



**News Title :** Pelaku Usaha dan Bappebti Satu Suara Minta Pajak Kripto Dikaji Ulang

**Media Name :** kompas.com

**Journalist :** Rully R Ramli

**Publish Date :** 03 March 2024

**Tonality :** Positive

**News Page :**

**News Value :** 0

**Resources :** Oscar Darmawan (CEO Indodax), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Bappebti)

**Ads Value :** 0

**Section/Rubrication :** Money

**Topic :** Pajak Kripto

**Pelaku Usaha dan Bappebti Satu Suara Minta Pajak Kripto Dikaji Ulang**

Kompas.com - 03/03/2024, 08:00 WIB  
 Rully R. Ramli, Aprilia Ika  
 Foto: Reuters



Ilustrasi platform pertukaran aset kripto. (FREEMPAK/WIREIMAGE)

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Pelaku usaha industri kripto dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menilai, besaran pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) perlu dievaluasi. Hal ini dengan mempertimbangkan keberlangsungan industri kripto nasional.

Selaku pelaku industri kripto di Indonesia, CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, pemberlakuan pajak kripto memberikan beban finansial yang sangat berat bagi para investor kripto.

Total jumlah pajak yang harus disetorkan setiap bulan diklaim melebihi pendapatan para pelaku industri.

"Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia yaitu PPH sebesar 0,10 persen, PPN sebesar 0,11 persen, dan tambahan 0,02 persen untuk biaya bursa, deposito, dan kliring," tutur Oscar, dalam keterangannya, Sabtu (2/3/2024).

**Baca juga:** [Kawatir Investor Lari ke Luar Negeri, Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Pajak Kripto](#)

Bahkan, jika bertransaksi menggunakan stablecoin seperti USDT, akan dikenakan penggantian pajak.

Menurut Oscar, banyaknya jenis pajak yang dikenakan, membuat jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh investor menjadi mahal dan berpotensi mematikan industri kripto di Indonesia.

Oscar pun menilai, industri kripto membutuhkan sebuah trigger atau pemicu untuk merangsang pertumbuhannya.

Menurutnya, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan melakukan peninjauan kembali besaran nominal pajak kripto di Indonesia dengan menghapus besaran PPN dan hanya dikenakan PPH.

"Karena dalam waktu dekat industri kripto dari Bappebti akan dialihkan ke OJK, artinya kripto akan menjadi bagian dari industri keuangan. Maka dari itu, tidak tepat jika masih dikenakan PPH dan diharapkan pajaknya bisa menjadi 0,1 persen," ujar Oscar.

**Baca juga:** [Pemerintah Sudah Kantongi Rp 456,4 Miliar dari Pajak Kripto dan Fintech](#)



Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya bilang, pajak kripto menjadi penting bagi penerimaan negara. Ini berdasarkan dari porsi setoran pajak kripto yang mencapai 50 persen dari total setoran pajak fintech.

"Memang adanya pengenaan pajak di industri kripto dapat menambah pendapatan negara kurang lebih Rp 259 miliar. Pajak kripto pun berkontribusi lebih dari 50 persen dalam industri fintech," katanya.

"Regulasi ini lahir untuk mengatur, bukan mengekang ataupun menghambat. Namun ternyata adanya regulasi ini dalam implementasinya berdampak di pasar dan menambah biaya yang harus dibayarkan oleh investor," sambung Tirta.

Oleh karenanya, Tirta juga mengakui bahwa adanya pengenaan pajak dalam industri kripto ini perlu dilakukan pertimbangan kembali. Apalagi, semakin banyak investor yang beralih ke platform luar negeri.

"Oleh karena itu, diperlukan audiensi bersama-sama Bappebti, OJK, Dijen Pajak, pelaku industri, hingga asosiasi untuk menentukan nominal pajak yang sesuai," katanya.

**Baca juga:** [Contoh Perhitungan Pajak Kripto, Ini Cara Hitung PPH dan PPN Aset Kripto](#)

Direktur Eksekutif Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Asparkindo) Ash Kerriangh menekankan, satu hal yang perlu diperhatikan dari dampak pengenaan pajak ini adalah daya saing exchange crypto di Indonesia.

Beralihnya investor ke luar negeri tentu berimbas terhadap keberlangsungan platform kripto lokal.

"Oleh karena itu, perlu penyesuaian untuk mencegah hal tersebut karena dapat berdampak pada daya saing exchange crypto dalam negeri. Terlebih aset kripto akan menjadi salah satu bagian dari sektor keuangan," ucap Ash.

Baca berita terbaru lain. [Gobling Kompas.com](#)

Baca berita terbaru lain. [Gobling Kompas.com](#)

- TERPOPULER**
- 1 Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 3 Maret 2024  
Ditulis 2.702 kali
  - 2 Mulai April 2024 Garuda Tambah Jadwal Terbang di 16 Kota Ini, Ada Yogyakarta...  
Ditulis 1.942 kali
  - 3 Utang AS Naik Rp 15.702 Triliun Saban 100 Hari, Emas dan Bitcoin Jadi Makin Diminati  
Ditulis 919 kali
  - 4 Beredar 4 Nama Calon Menku yang Dincar Prabowo, Erick Thohir, Gernganyo Bagus  
Ditulis 774 kali
  - 5 Asosiasi Guru Tolak Dana BOS Sekolah Dipakai untuk Makan Siang Gratis  
Ditulis 635 kali

Baca berita terbaru lain. [Gobling Kompas.com](#)

**NOW TRENDING**

**KPU**  
Bawaku Telusuri Dugaan Pengembangan Suara PSI di Cilegon

**Perjaja Liris Dewa United, Thomas Doll Lega Usai Februari Mendetta**

**Melihat Program Makan Siang Gratis di India, Anggaran, Skema, dan Dampaknya**

**Jimmy Aashidige: Sult Buktikan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Pilpres**

**Mulut Mayat Indiana Dipakai Masker Seolah Tertidur, 3 Hari Dibawa Naik Mobil**

**Suara PSI Naik Pesat, Pengamat: Tak Mungkin Simsalabim Langsung Melonjak**

**Romahurmuziy Ungkap 2 Modus untuk Loloskan PSI ke Parlemen**